Realism: Law Review
Volume 2 Nomor 3
Desember 2024

Perkembangan dan Tantangan Pendidikan Madrasah di Nusa Tenggara Barat: Analisis Statistik, Kebijakan, dan Aspek Hukum

Agus Salim[1], Suryati[2]

[1]Fakutas Budaya Manajemen dan Bisnis/Pendidikan Bahasa Inggris, UNDIKMA/Mataram, Indonesia, agussalim@undikma.ac.id
[2]Fakultas Sains, Teknik Dan Terapan /Pendidikan Kimia, UNDIKMA/Mataram, Indonesia, suryati@undikma.ac.id

Abstract

This research investigates the development and challenges of madrasah education in Nusa Tenggara Barat (NTB) from a statistical, policy, and legal perspective. The study utilizes data from the 2021 NTB Education Statistics, collected through the National Socioeconomic Survey (Susenas) and secondary data from the NTB Department of Education. The analysis covers the number and distribution of madrasahs, student enrollment rates (gross and net enrollment ratios), teacher qualifications, and educational facilities. The findings highlight significant disparities in madrasah distribution and quality between urban and rural areas, lower enrollment rates in rural regions, challenges in teacher competency, and inadequate infrastructure. The legal analysis focuses on the implementation of educational policies and regulations governing madrasah education. The results underscore the need for targeted policy interventions to enhance the accessibility and quality of madrasah education in NTB. Recommendations include improving teacher training programs, increasing investment in educational infrastructure, and ensuring equitable distribution of resources.

Keywords*: *Educational Policy, Legal Aspects, Madrasah Education, Statistical Analysis.

Abstrak

Penelitian ini menyelidiki perkembangan dan tantangan pendidikan madrasah di Nusa Tenggara Barat (NTB) dari perspektif statistik, kebijakan, dan hukum. Studi ini menggunakan data dari Statistik Pendidikan NTB 2021 yang dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan data sekunder dari Dinas Pendidikan NTB. Analisis mencakup jumlah dan distribusi madrasah, tingkat partisipasi siswa (angka partisipasi kasar dan murni), kualifikasi guru, dan fasilitas pendidikan. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam distribusi dan kualitas madrasah antara daerah perkotaan dan pedesaan, tingkat partisipasi yang lebih rendah di daerah pedesaan,

tantangan dalam kompetensi guru, dan infrastruktur yang tidak memadai. Analisis hukum berfokus pada implementasi kebijakan pendidikan dan regulasi yang mengatur pendidikan madrasah. Hasilnya menyoroti perlunya intervensi kebijakan yang terarah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan madrasah di NTB. Rekomendasi termasuk meningkatkan program pelatihan guru, meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan, dan memastikan distribusi sumber daya yang merata.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Aspek Hukum, Pendidikan Madrasah, Analisis Statistik.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan madrasah di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang menggabungkan kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan agama Islam. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), madrasah memainkan peran penting dalam pembentukan karakter dan pengetahuan siswa, terutama di daerah pedesaan di mana akses ke sekolah umum mungkin terbatas. Namun, pendidikan madrasah di NTB menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan tantangan pendidikan madrasah di NTB melalui analisis statistik, kebijakan, dan aspek hukum (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003; Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2020). Madrasah di NTB telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Menurut data dari Statistik Pendidikan NTB 2021, terdapat sekitar 200 madrasah yang tersebar di seluruh provinsi, dengan 120 di antaranya berada di daerah pedesaan dan 80 di perkotaan (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021). Madrasah-madrasah ini menawarkan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, yang mencakup Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Pendidikan

madrasah tidak hanya berfokus pada ilmu pengetahuan umum tetapi juga pada pendidikan agama Islam, yang penting bagi masyarakat di NTB yang mayoritas beragama Islam (Zuhdi, 2018).

Jumlah madrasah cukup banyak, distribusinya tidak merata, dengan lebih banyak madrasah di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat pedesaan akan akses pendidikan yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Namun, distribusi yang tidak merata ini juga menimbulkan tantangan dalam hal kualitas pendidikan. Madrasah di daerah pedesaan sering kali kekurangan fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, dan alat bantu belajar lainnya (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021). Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang buruk dan transportasi yang terbatas, juga mempengaruhi akses siswa ke madrasah, terutama di daerah terpencil (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019). Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator penting untuk mengukur partisipasi siswa dalam pendidikan. Data menunjukkan bahwa APK untuk madrasah di NTB adalah 85% untuk jenjang MTs dan 70% untuk jenjang MA, sedangkan APM menunjukkan partisipasi yang lebih rendah di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021). Partisipasi yang rendah di daerah pedesaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesulitan akses, kualitas pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan (Suyanto, 2017).

Kualitas pendidikan di madrasah sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Data menunjukkan bahwa banyak guru di madrasah belum memenuhi kualifikasi minimal yang

ditetapkan oleh pemerintah (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021). Di NTB, terutama di daerah pedesaan, banyak guru madrasah yang belum memiliki kualifikasi sarjana (S1) dan belum mengikuti pelatihan profesional yang memadai. Hal ini berdampak pada kualitas pengajaran dan pembelajaran di madrasah, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil belajar siswa (Hasbullah, 2015). Infrastruktur pendidikan merupakan faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Di NTB, banyak madrasah yang belum memiliki fasilitas yang memadai. Menurut Statistik Pendidikan NTB 2021, banyak madrasah yang tidak memiliki laboratorium, perpustakaan, atau ruang kelas yang memadai (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021). Kondisi ini lebih buruk di daerah pedesaan, di mana madrasah sering kali beroperasi di bangunan yang tidak layak dan kekurangan fasilitas dasar. Ketiadaan fasilitas ini membuat proses belajar mengajar kurang efektif dan mempengaruhi motivasi serta prestasi belajar siswa (Munir, 2018).

Kerangka hukum yang mengatur pendidikan madrasah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yang mengakui madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan di lapangan. Regulasi yang mengatur pendidikan madrasah sering kali tidak diikuti dengan dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk pendanaan maupun tenaga pendidik (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003). Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan madrasah (Kusumaningrum, 2020). Pendidikan madrasah memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa dan memberikan mereka pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama

Islam. Selain itu, madrasah juga berfungsi sebagai pusat komunitas di mana nilai-nilai sosial dan keagamaan diajarkan dan dipraktikkan. Dalam konteks NTB, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam, madrasah memainkan peran penting dalam mendidik generasi muda untuk menjadi individu yang berakhlak mulia dan memiliki pengetahuan agama yang kuat (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2020).

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh madrasah di NTB, diperlukan berbagai strategi pengembangan. Pertama, peningkatan kualitas dan kompetensi guru melalui program pelatihan dan pendidikan lanjutan sangat penting. Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas guru madrasah (Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2021). Kedua, peningkatan investasi dalam infrastruktur pendidikan harus menjadi prioritas, terutama di daerah pedesaan. Pembangunan fasilitas yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak akan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (Munir, 2018). Ketiga, kebijakan pendidikan harus diimplementasikan dengan dukungan sumber daya yang memadai dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah (Kusumaningrum, 2020). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan madrasah di Indonesia, termasuk di NTB, menghadapi berbagai kendala, seperti kekurangan guru yang berkualifikasi, keterbatasan fasilitas, dan kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Hasbullah, 2015; Munir, 2018). Studi-studi ini telah mengidentifikasi bahwa kualitas pendidikan sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti dukungan infrastruktur dan kebijakan pemerintah (Zuhdi, 2018). Namun, penelitian ini menambahkan analisis hukum dan kebijakan yang lebih

mendalam untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif. Analisis ini mencakup implementasi regulasi pendidikan madrasah, efisiensi alokasi sumber daya, serta evaluasi kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya fokus pada aspek teknis dan operasional dari pendidikan madrasah, tetapi juga memperhatikan aspek hukum dan kebijakan yang dapat mendukung atau menghambat perkembangan pendidikan madrasah di NTB (Kusumaningrum, 2020). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih holistik dan aplikatif bagi pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan madrasah

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan dan tantangan pendidikan madrasah di NTB dengan fokus pada analisis statistik, kebijakan, dan aspek hukum. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan menyertakan analisis kebijakan hukum yang mengatur pendidikan madrasah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menggambarkan kondisi pendidikan madrasah di Nusa Tenggara Barat (NTB). Metode deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai berbagai aspek pendidikan madrasah berdasarkan data yang tersedia (Sugiyono, 2018). Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah dan menganalisis data numerik sehingga dapat memberikan informasi yang objektif dan dapat diukur (Creswell, 2014).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Pengelolaan Pendidikan Berbasis Komunitas

Pendidikan madrasah di Indonesia memiliki landasan teoritis yang kuat, yang mencakup berbagai teori pendidikan umum serta pendidikan berbasis agama. Kajian teori ini akan menguraikan beberapa teori utama yang relevan dengan pendidikan madrasah, termasuk teori partisipasi sekolah, teori kompetensi guru, dan teori pengelolaan pendidikan berbasis komunitas. Selain itu, kajian ini juga akan menyoroti beberapa penelitian terbaru yang memberikan wawasan lebih lanjut tentang tantangan dan peluang dalam pendidikan madrasah. Teori partisipasi sekolah berfokus pada tingkat keikutsertaan siswa dalam sistem pendidikan. Menurut teori ini, berbagai faktor mempengaruhi partisipasi siswa, termasuk faktor sosial-ekonomi, aksesibilitas sekolah, dan kualitas pendidikan yang ditawarkan (Buchmann & Hannum, 2001). Dalam konteks pendidikan madrasah di NTB, teori ini membantu menjelaskan mengapa partisipasi siswa di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang kurang memadai, jarak yang jauh ke sekolah, dan kesulitan ekonomi keluarga sering kali menjadi penghambat utama partisipasi siswa (Suyanto, 2017).

Kompetensi guru adalah salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Teori ini menekankan pentingnya kualifikasi, pelatihan, dan pengalaman guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa (Darling-Hammond, 2000). Kompetensi guru mencakup pengetahuan pedagogis, keterampilan mengajar, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kebutuhan siswa yang beragam. Dalam konteks madrasah di NTB, banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi yang diharapkan, seperti memiliki gelar

sarjana dan pelatihan profesional yang memadai (Hasbullah, 2015). Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru melalui program pelatihan yang terstruktur dapat berdampak positif pada kualitas pengajaran dan pembelajaran (Shulman, 1987; Darling-Hammond et al., 2005). Pengelolaan pendidikan berbasis komunitas menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung dan mengelola institusi pendidikan. Teori ini berargumen bahwa ketika komunitas lokal terlibat secara aktif dalam pendidikan, hasilnya akan lebih baik karena adanya dukungan sosial, pengawasan, dan kontribusi sumber daya yang lebih besar (Epstein, 1995). Dalam konteks madrasah, pengelolaan berbasis komunitas dapat membantu mengatasi beberapa tantangan seperti kekurangan dana dan keterbatasan infrastruktur. Komunitas dapat berperan dalam menyediakan dukungan finansial, tenaga kerja sukarela, dan pengawasan yang memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga (Cummings & Riddell, 1994).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pendidikan madrasah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, namun juga memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Studi oleh Zuhdi (2018) mengidentifikasi bahwa pendidikan madrasah memiliki keunggulan dalam membentuk karakter dan moral siswa melalui pendidikan agama yang intensif. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya, baik dalam bentuk dana maupun tenaga pengajar yang berkualitas. Penelitian oleh Munir (2018) juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan madrasah dapat dicapai melalui peningkatan kompetensi guru dan investasi dalam infrastruktur pendidikan. Selain itu, studi oleh Kusumaningrum (2020) menyoroti pentingnya kebijakan pendidikan

yang efektif dan dukungan pemerintah yang konsisten untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

Integrasi Teori dalam Konteks Pendidikan Madrasah di NTB

Mengintegrasikan teori-teori ini dalam konteks pendidikan madrasah di NTB memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi tantangan yang ada. Teori partisipasi sekolah membantu menjelaskan rendahnya tingkat partisipasi siswa di daerah pedesaan, sementara teori kompetensi guru dan teori pengelolaan pendidikan berbasis komunitas memberikan solusi potensial untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk mengatasi tantangan partisipasi, dapat dilakukan intervensi yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas sekolah melalui pembangunan infrastruktur dan penyediaan transportasi yang lebih baik. Dalam hal kompetensi guru, program pelatihan dan pendidikan lanjutan yang dirancang khusus untuk kebutuhan guru madrasah dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran. Selain itu, melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan madrasah dapat memastikan bahwa sekolah memiliki dukungan yang diperlukan untuk beroperasi dengan efektif dan memenuhi kebutuhan siswa. Kesimpulannya, teori-teori pendidikan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh madrasah di NTB, tetapi juga menawarkan strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis pada bukti, pendidikan madrasah di NTB dapat ditingkatkan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi semua siswa.

Jumlah dan Persebaran Madrasah di NTB

Berdasarkan data dari Statistik Pendidikan NTB 2021, terdapat total 200 madrasah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Distribusi madrasah ini menunjukkan bahwa ada 120 madrasah yang berada di daerah pedesaan dan 80 madrasah yang terletak di daerah perkotaan. Distribusi ini mencerminkan kebutuhan masyarakat pedesaan yang lebih tinggi akan pendidikan berbasis agama, mengingat aksesibilitas dan pilihan pendidikan yang lebih terbatas di daerah tersebut.

Tabel 1. Distribusi Madrasah di NTB Berdasarkan Lokasi

Area	Jumlah Madrasah
Perkotaan	80
Pedesaan	120
Total	**200**

BSP NTB 2021: **Distribusi Madrasah di NTB Berdasarkan Lokasi**

Distribusi madrasah yang lebih banyak di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan menunjukkan bahwa madrasah masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat pedesaan di NTB. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya akses ke sekolah-sekolah umum, kebutuhan akan pendidikan agama yang lebih kuat, dan peran madrasah sebagai pusat komunitas di daerah pedesaan.

Jumlah Madrasah Berdasarkan Jenjang Pendidikan dari total 200 madrasah di NTB, jenjang pendidikan yang ditawarkan bervariasi. Data menunjukkan bahwa terdapat:

Tabel 2. Jumlah Madrasah Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah Madrasah
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	100
Madrasah Tsanawiyah (MTs)	70
Madrasah Aliyah (MA)	30
Total	**200**

BSP NTB 2021: **Jumlah Madrasah Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Pembagian madrasah berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas madrasah di NTB adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), yang setara dengan sekolah dasar dalam sistem pendidikan umum. Ini menunjukkan fokus yang kuat pada pendidikan dasar dalam lingkungan madrasah.

Persebaran Madrasah Berdasarkan Kabupaten/Kota. Data lebih lanjut menunjukkan distribusi madrasah di berbagai kabupaten dan kota di NTB. Berikut adalah:

Tabel 3. Persebaran Madrasah Berdasarkan Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Madrasah
Kabupaten Lombok Barat	30
Kabupaten Lombok Timur	50
Kota Mataram	20
Total	**100**

BSP NTB 2021: Persebaran Madrasah Berdasarkan Kabupaten/Kota

Persebaran madrasah yang bervariasi di berbagai kabupaten dan kota menunjukkan adanya kebutuhan dan prioritas yang berbeda di setiap daerah. Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah madrasah yang lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya, yang mungkin mencerminkan populasi yang lebih besar atau kebutuhan pendidikan agama yang lebih tinggi di daerah tersebut. Distribusi madrasah yang lebih banyak di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan menunjukkan bahwa madrasah masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat pedesaan di NTB. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya akses ke sekolah-sekolah umum, kebutuhan akan pendidikan agama yang lebih kuat, dan peran madrasah sebagai pusat komunitas di daerah pedesaan. Namun, distribusi yang tidak merata ini juga menimbulkan beberapa tantangan. Madrasah di daerah pedesaan sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas dan sumber daya. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti kurangnya laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak, menjadi kendala utama yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah-madrasah tersebut. Keterbatasan fasilitas ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan yang dapat diberikan oleh madrasah. Kurangnya akses ke sumber belajar yang memadai dan infrastruktur yang baik membuat proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan tidak mampu memenuhi standar pendidikan yang diharapkan.

Dari perspektif hukum, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 mengakui madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dan memberikan dasar hukum untuk pengelolaan dan pengembangan madrasah. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi berbagai kendala di lapangan. Regulasi yang ada perlu diikuti dengan dukungan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk pendanaan

maupun tenaga pendidik yang berkualitas. Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa kebijakan dan langkah-langkah yang perlu diambil meliputi:

1. **Peningkatan Infrastruktur**:
    a. Pemerintah daerah dan pusat harus berkoordinasi untuk memastikan adanya dana yang cukup untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur madrasah, terutama di daerah pedesaan. Ini termasuk pembangunan laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak.
    b. Program-program seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) harus diprioritaskan untuk madrasah yang berada di daerah tertinggal dan terpencil.
2. **Pengembangan Kompetensi Guru**:
    a. Program pelatihan dan sertifikasi guru harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua guru madrasah memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Pelatihan berkelanjutan dan pengembangan profesional juga harus menjadi bagian dari kebijakan pendidikan madrasah.
    b. Kebijakan insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil dapat membantu mengatasi masalah kekurangan tenaga pengajar berkualitas di daerah pedesaan.
3. **Akses dan Kualitas Pendidikan**:
    a. Peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui penyediaan transportasi sekolah yang memadai di daerah pedesaan untuk mengurangi hambatan akses bagi siswa.

b. Kebijakan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (APM).

4. **Penguatan Kelembagaan dan Regulasi**:
   a. Implementasi regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa dana dan sumber daya yang dialokasikan untuk madrasah digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
   b. Penguatan peran Kementerian Agama dalam pengelolaan dan pengawasan madrasah untuk memastikan bahwa standar pendidikan nasional terpenuhi.
5. **Kolaborasi dengan Komunitas dan Pemangku Kepentingan**:
   a. Meningkatkan keterlibatan komunitas lokal dalam mendukung pendidikan madrasah. Ini termasuk kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan madrasah.
   b. Program kemitraan antara madrasah dan sekolah umum untuk berbagi sumber daya dan praktik terbaik dalam pendidikan.

Dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif, tantangan dalam pendidikan madrasah di NTB dapat diatasi. Hal ini akan memastikan bahwa semua siswa, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, memiliki akses ke pendidikan berkualitas yang layak dan memadai. Peningkatan kualitas pendidikan madrasah tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi siswa, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan membentuk generasi muda yang berpengetahuan dan berakhlak mulia.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Madrasah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi siswa dalam pendidikan. Data dari Statistik Pendidikan NTB 2021 menunjukkan bahwa APS untuk madrasah di NTB adalah 85% untuk jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 70% untuk jenjang Madrasah Aliyah (MA). Sementara itu, APM menunjukkan partisipasi yang lebih rendah di daerah pedesaan dibandingkan dengan perkotaan.

Tabel 4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di Madrasah NTB

Jenjang Pendidikan	APS (%)	APM (%)
MTs	85	78
MA	70	65

BSP NTB 2021: **Angka APS dan APM di Madrasah NTB**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk madrasah di NTB menunjukkan bahwa 85% siswa usia sekolah menengah pertama bersekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 70% siswa usia sekolah menengah atas bersekolah di Madrasah Aliyah (MA). APS yang tinggi ini menunjukkan bahwa madrasah di NTB masih menjadi pilihan utama bagi banyak siswa, terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama. Sedangkan, angka Partisipasi Murni (APM) memberikan gambaran lebih rinci tentang partisipasi siswa sesuai dengan kelompok usia yang seharusnya berada pada jenjang pendidikan tertentu. APM untuk madrasah di NTB menunjukkan bahwa 78% siswa usia MTs dan 65% siswa usia MA terdaftar di madrasah yang sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. APM yang lebih rendah dibandingkan dengan APS menunjukkan bahwa ada sejumlah siswa yang bersekolah di luar

kelompok usia yang sesuai, yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti penundaan masuk sekolah atau pengulangan kelas.

Perbedaan Partisipasi Berdasarkan Daerah

Perbedaan partisipasi antara daerah perkotaan dan pedesaan juga terlihat jelas dalam data APM. Siswa di daerah pedesaan cenderung memiliki APM yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa di daerah perkotaan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap perbedaan ini termasuk:

a) **Aksesibilitas**: Siswa di daerah pedesaan sering kali menghadapi tantangan aksesibilitas yang lebih besar, termasuk jarak yang lebih jauh ke sekolah dan kurangnya transportasi yang memadai.
b) **Kondisi Ekonomi**: Keluarga di daerah pedesaan mungkin memiliki kondisi ekonomi yang lebih sulit, yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah secara konsisten.
c) **Kesadaran Akan Pendidikan**: Tingkat kesadaran dan prioritas terhadap pendidikan mungkin lebih rendah di beberapa komunitas pedesaan dibandingkan dengan perkotaan.

Implikasi Kebijakan

Untuk meningkatkan APS dan APM, terutama di daerah pedesaan, beberapa kebijakan dan langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. **Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan**:
    a. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi untuk memudahkan akses siswa ke madrasah, termasuk penyediaan transportasi sekolah.
    b. Pembangunan madrasah baru di daerah-daerah terpencil yang saat ini belum terjangkau oleh fasilitas pendidikan.
2. **Dukungan Ekonomi untuk Keluarga**:
    a. Program beasiswa dan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat terus bersekolah tanpa harus khawatir tentang biaya.
    b. Bantuan langsung atau program conditional cash transfer yang terkait dengan kehadiran anak di sekolah.
3. **Peningkatan Kualitas Pendidikan di Madrasah**:
    a. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru madrasah untuk meningkatkan kualitas pengajaran.
    b. Penyediaan fasilitas belajar yang memadai, seperti laboratorium, perpustakaan, dan alat bantu belajar lainnya.
4. **Kampanye Kesadaran Pendidikan**:
    a. Program sosialisasi dan kampanye kesadaran tentang pentingnya pendidikan, terutama di komunitas-komunitas pedesaan.

b. Pelibatan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam mendorong partisipasi pendidikan.

Implementasi kebijakan yang efektif dan terkoordinasi dengan baik dapat membantu meningkatkan angka partisipasi sekolah dan partisipasi murni di madrasah-madrasah NTB, serta memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Kualitas Pendidikan dan Kompetensi Guru Madrasah

Kualitas pendidikan di madrasah sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Data menunjukkan bahwa banyak guru di madrasah belum memenuhi kualifikasi minimal yang ditetapkan, dengan distribusi yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan data dari Statistik Pendidikan NTB 2021, terdapat perbedaan signifikan dalam kualifikasi dan kompetensi guru antara madrasah di daerah perkotaan dan pedesaan.

Tabel 5. Kualifikasi Guru Madrasah di NTB

Lokasi	Guru Berkualifikasi S1 (%)	Guru Tidak Berkualifikasi S1 (%)
Perkotaan	60	40
Pedesaan	30	70

BSP NTB 2021: **Kualifikasi Guru Madrasah di NTB**

Kualifikasi Guru

Kualifikasi minimal yang ditetapkan untuk guru madrasah adalah gelar sarjana (S1). Data menunjukkan bahwa di daerah perkotaan, 60% guru madrasah telah memenuhi kualifikasi ini, sedangkan di daerah pedesaan hanya 30% guru yang memiliki kualifikasi S1. Sebaliknya, 70% guru di daerah pedesaan belum memenuhi kualifikasi minimal ini. Ketimpangan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kualitas pendidikan yang diberikan di madrasah perkotaan dan pedesaan.

Kompetensi Guru

Kompetensi guru mencakup kemampuan pedagogis, keahlian dalam mata pelajaran yang diajarkan, serta kemampuan untuk mengelola kelas dan memotivasi siswa. Kurangnya kualifikasi formal sering kali berkorelasi dengan rendahnya kompetensi dalam berbagai aspek ini. Guru yang tidak memiliki kualifikasi yang memadai mungkin kurang siap dalam menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan kurang terampil dalam penggunaan teknologi pendidikan.

Distribusi Guru Berkualifikasi

Distribusi guru berkualifikasi yang tidak merata ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. **Kurangnya Akses ke Pendidikan Tinggi**:
    a. Guru di daerah pedesaan sering kali memiliki akses yang terbatas ke program pendidikan tinggi atau program pelatihan profesional yang dapat meningkatkan kualifikasi mereka.
2. **Infrastruktur yang Tidak Memadai**:
    a. Keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan, termasuk kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, membuat sulit bagi guru untuk mengikuti program pelatihan atau pendidikan lanjutan.
3. **Kondisi Ekonomi**:
    a. Kondisi ekonomi yang sulit di banyak daerah pedesaan juga menjadi penghambat bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi mereka, karena biaya pendidikan tambahan mungkin tidak terjangkau.

Implikasi Kebijakan

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah, terutama di daerah pedesaan, beberapa kebijakan dan langkah-langkah berikut perlu diambil:

1. **Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan untuk Guru**:
    a. Pemerintah harus menyediakan program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi guru di daerah pedesaan untuk meningkatkan kualifikasi mereka.

Beasiswa ini bisa mencakup biaya pendidikan, biaya hidup selama studi, dan dukungan lain yang diperlukan.

2. **Pelatihan Profesional Berkelanjutan**:
    a. Program pelatihan profesional yang berkelanjutan harus disediakan untuk semua guru madrasah. Program ini harus mencakup pelatihan dalam metode pengajaran modern, penggunaan teknologi pendidikan, dan pengembangan keterampilan manajemen kelas.
3. **Insentif untuk Guru Berkualifikasi**:
    a. Insentif finansial dan non-finansial harus diberikan kepada guru yang berhasil meningkatkan kualifikasi mereka. Insentif ini bisa berupa kenaikan gaji, pengakuan profesional, dan kesempatan untuk karier yang lebih baik.
4. **Penguatan Infrastruktur Pendidikan**:
    a. Peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah pedesaan sangat penting untuk mendukung program pelatihan dan pendidikan bagi guru. Ini termasuk pembangunan pusat pelatihan guru, akses internet yang lebih baik, dan fasilitas pendukung lainnya.
5. **Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi**:
    a. Pemerintah dan madrasah harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk menyediakan program pendidikan jarak jauh yang memungkinkan guru di daerah pedesaan untuk meningkatkan kualifikasi mereka tanpa harus meninggalkan daerah tempat mereka mengajar.

Dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif, kualitas pendidikan di madrasah dapat ditingkatkan secara signifikan. Ini akan memastikan bahwa semua siswa, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, menerima pendidikan yang berkualitas dan setara.

Fasilitas dan Infrastruktur Pendidikan di Madrasah

Infrastruktur madrasah di NTB masih kurang memadai, terutama di daerah pedesaan, dengan banyak madrasah yang tidak memiliki fasilitas dasar seperti laboratorium dan perpustakaan. Berdasarkan data dari Statistik Pendidikan NTB 2021, kondisi fasilitas pendidikan di madrasah menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara madrasah di daerah perkotaan dan pedesaan.

Tabel 6. Ketersediaan Fasilitas di Madrasah NTB

Fasilitas	Perkotaan (%)	Pedesaan (%)
Laboratorium	70	30
Perpustakaan	65	25

BSP NTB 2021: Ketersediaan Fasilitas di Madrasah NTB

Kondisi Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur di madrasah sangat bervariasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan, sekitar 70% madrasah memiliki laboratorium yang memadai, sementara hanya 30% madrasah di daerah pedesaan yang memiliki fasilitas tersebut. Demikian pula, perpustakaan tersedia di 65% madrasah perkotaan, tetapi hanya

25% madrasah pedesaan yang memiliki perpustakaan. Ketersediaan ruang kelas yang layak juga lebih tinggi di perkotaan (80%) dibandingkan dengan pedesaan (40%).

Dampak Infrastruktur Terhadap Kualitas Pendidikan

Kekurangan fasilitas dasar seperti laboratorium dan perpustakaan berdampak langsung pada kualitas pendidikan di madrasah. Laboratorium sangat penting untuk pembelajaran praktis dalam mata pelajaran sains, sementara perpustakaan menyediakan sumber daya belajar yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran mandiri dan penelitian. Tanpa fasilitas ini, siswa di madrasah pedesaan mungkin tidak mendapatkan pengalaman belajar yang sekomprehensif siswa di madrasah perkotaan.

Tantangan Infrastruktur di Daerah Pedesaan

Beberapa tantangan utama yang dihadapi madrasah di daerah pedesaan dalam menyediakan fasilitas yang memadai meliputi:

1. **Keterbatasan Anggaran**:
    a. Madrasah di daerah pedesaan sering kali menerima anggaran yang lebih rendah dibandingkan dengan madrasah di perkotaan. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk membangun dan memelihara fasilitas yang memadai.
2. **Aksesibilitas dan Logistik**:
    a. Lokasi geografis yang terpencil membuat pengiriman bahan bangunan dan peralatan menjadi lebih sulit dan mahal. Hal ini menghambat pembangunan infrastruktur baru atau perbaikan fasilitas yang ada.

3. **Keterbatasan Tenaga Ahli**:
    a. Kekurangan tenaga ahli dan teknisi yang terlatih di daerah pedesaan juga menjadi kendala dalam pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan.

Implikasi Kebijakan

Untuk mengatasi tantangan infrastruktur ini, beberapa kebijakan dan langkah-langkah berikut perlu diambil:

1. **Peningkatan Anggaran Pendidikan untuk Madrasah Pedesaan**:
    - Alokasi anggaran yang lebih besar untuk madrasah di daerah pedesaan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur. Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dioptimalkan untuk mendukung inisiatif ini.
2. **Program Pembangunan Fasilitas Pendidikan**:
    - Program pembangunan fasilitas seperti laboratorium dan perpustakaan di madrasah pedesaan. Ini termasuk penyediaan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk operasional fasilitas tersebut.
3. **Kerjasama dengan Sektor Swasta dan LSM**:
    - Kerjasama dengan sektor swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendapatkan dukungan tambahan dalam bentuk dana, peralatan, dan keahlian teknis untuk pembangunan infrastruktur.

4. **Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan**:
    - Pelatihan bagi kepala madrasah dan staf teknis tentang cara mengelola dan memelihara fasilitas pendidikan dengan baik. Ini juga termasuk pelatihan dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang.
5. **Monitoring dan Evaluasi**:
    - Sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur digunakan secara efisien dan efektif.

Dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat, kualitas infrastruktur pendidikan di madrasah, terutama di daerah pedesaan, dapat ditingkatkan. Hal ini akan memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar dan kesejahteraan siswa secara keseluruhan.

Aspek Hukum dalam Pengelolaan Madrasah

Analisis kebijakan menunjukkan bahwa implementasi regulasi pendidikan madrasah masih belum optimal, dengan banyak tantangan dalam penerapan di lapangan. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, madrasah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun, pelaksanaan regulasi ini sering kali menghadapi berbagai kendala.

Tabel 7. Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Madrasah

Tantangan	Deskripsi
Kurangnya Pendanaan	Pendanaan yang tidak memadai untuk mendukung operasional dan pengembangan madrasah.
Kurangnya Tenaga Pendidik	Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi.
Kurangnya Infrastruktur	Kekurangan fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak.
Ketidaksesuaian Implementasi	Perbedaan dalam penerapan kebijakan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Koordinasi yang Kurang Efektif	Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara lembaga terkait.

BSP NTB 2021: **Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan Madrasah**

Pendanaan merupakan salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pendidikan madrasah. Dana yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan madrasah. Anggaran yang terbatas berdampak pada ketersediaan fasilitas, pengembangan kurikulum, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Madrasah di daerah pedesaan sering kali lebih terdampak oleh kekurangan pendanaan ini dibandingkan dengan madrasah di daerah perkotaan. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi menjadi tantangan lain dalam pengelolaan madrasah. Banyak guru madrasah, terutama di daerah pedesaan, belum memiliki kualifikasi minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berdampak pada kualitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru madrasah masih kurang optimal dalam menjangkau semua guru, terutama di daerah terpencil.

Kekurangan infrastruktur juga menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Banyak madrasah, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki

fasilitas dasar seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak. Kurangnya fasilitas ini berdampak pada efektivitas proses pembelajaran dan menghambat pengembangan kemampuan siswa. Perbedaan dalam penerapan kebijakan antara daerah perkotaan dan pedesaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian implementasi regulasi pendidikan madrasah. Madrasah di daerah pedesaan sering kali tidak mendapatkan dukungan yang sama seperti madrasah di perkotaan, baik dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun program pengembangan profesional bagi guru.

Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara lembaga terkait menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan madrasah. Koordinasi yang tidak efektif mengakibatkan kebijakan yang diterapkan di lapangan tidak konsisten dan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lokal. Perbaikan koordinasi dan komunikasi antara semua pihak yang terlibat sangat penting untuk memastikan kebijakan pendidikan madrasah dapat diimplementasikan dengan efektif.

Implikasi Kebijakan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa kebijakan dan langkah-langkah berikut perlu diambil:

1. **Peningkatan Pendanaan**:
    a. Alokasi anggaran yang lebih besar untuk madrasah, terutama di daerah pedesaan, untuk mendukung operasional dan pengembangan infrastruktur.
    b. Pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan kebutuhan.

2. **Pengembangan Kompetensi Guru**:
    a. Program pelatihan dan sertifikasi yang lebih terjangkau dan mudah diakses bagi guru madrasah di daerah terpencil.
    b. Insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik berkualifikasi.
3. **Peningkatan Infrastruktur**:
    a. Program pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan di madrasah, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak.
    b. Penyediaan alat bantu belajar dan teknologi pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran.
4. **Penyelarasan Implementasi Kebijakan**:
    a. Penyesuaian kebijakan pendidikan madrasah dengan kondisi lokal untuk memastikan implementasi yang efektif di semua daerah.
    b. Monitoring dan evaluasi yang ketat untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan perbaikan jika diperlukan.
5. **Peningkatan Koordinasi**:
    a. Pembentukan forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara lembaga terkait untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama.
    b. Penugasan koordinator pendidikan madrasah di setiap daerah untuk memastikan kebijakan diterapkan secara konsisten dan efektif.

Dengan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif, tantangan dalam pengelolaan pendidikan madrasah di NTB dapat diatasi. Hal ini akan memastikan

bahwa semua madrasah, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, dapat memberikan pendidikan yang berkualitas dan setara bagi semua siswa.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari berbagai aspek pendidikan madrasah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), beberapa kesimpulan utama dapat diambil. Terdapat total 200 madrasah di NTB, dengan distribusi yang lebih banyak di daerah pedesaan (120 madrasah) dibandingkan dengan daerah perkotaan (80 madrasah), mencerminkan kebutuhan masyarakat pedesaan yang lebih tinggi terhadap pendidikan berbasis agama. Mayoritas madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berjumlah 100, diikuti oleh Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 70, dan Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 30, menunjukkan fokus yang kuat pada pendidikan dasar dalam lingkungan madrasah. Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah madrasah tertinggi dengan 50 madrasah, diikuti oleh Kabupaten Lombok Barat dengan 30 madrasah, dan Kota Mataram dengan 20 madrasah, mencerminkan kebutuhan dan prioritas yang berbeda di setiap daerah. Ketersediaan fasilitas menunjukkan ketimpangan signifikan antara fasilitas di perkotaan dan pedesaan, di mana madrasah perkotaan memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas layak, dibandingkan dengan madrasah pedesaan, yang berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima siswa. Selain itu, implementasi regulasi pendidikan madrasah masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya pendanaan, keterbatasan tenaga pendidik berkualifikasi, kekurangan infrastruktur, ketidaksesuaian implementasi kebijakan

antara perkotaan dan pedesaan, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Saran

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan madrasah di NTB dan meningkatkan kualitas pendidikan, beberapa langkah kebijakan berikut dapat dipertimbangkan: Pertama, pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk madrasah, terutama di daerah pedesaan, untuk mendukung operasional dan pengembangan infrastruktur. Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, program pelatihan dan sertifikasi yang lebih terjangkau dan mudah diakses bagi guru madrasah di daerah terpencil perlu dikembangkan, serta memberikan insentif bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik berkualifikasi.

Kedua, program pembangunan dan perbaikan fasilitas pendidikan di madrasah, termasuk laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang layak harus ditingkatkan, serta penyediaan alat bantu belajar dan teknologi pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran. Penyesuaian kebijakan pendidikan madrasah dengan kondisi lokal juga penting untuk memastikan implementasi yang efektif di semua daerah, dengan monitoring dan evaluasi yang ketat untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Pembentukan forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antara lembaga terkait akan meningkatkan komunikasi dan kerjasama,

sementara penugasan koordinator pendidikan madrasah di setiap daerah akan memastikan kebijakan diterapkan secara konsisten dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2021). Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2021. BPS NTB.

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

Buchmann, C., & Hannum, E. (2001). Education and Stratification in Developing Countries: A Review of Theories and Research. Annual Review of Sociology, 27, 77-102.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Sage Publications.

Cummings, W. K., & Riddell, A. R. (1994). Alternative Policies for the Finance, Control, and Delivery of Basic Education. International Journal of Educational Development, 14(3), 233-248.

Darling-Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1), 1-44.

Darling-Hammond, L., et al. (2005). Does Teacher Preparation Matter? Evidence about Teacher Certification, Teach for America, and Teacher Effectiveness. Education Policy Analysis Archives, 13, 42.

Dinas Pendidikan NTB. (2020). Laporan Tahunan Pendidikan Madrasah NTB. Dinas Pendidikan NTB.

Epstein, J. L. (1995). School/Family/Community Partnerships: Caring for the Children We Share. Phi Delta Kappan, 76(9), 701-712.

Hasbullah. (2015). Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Rajawali Press.

Kusumaningrum, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan Madrasah di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 12(2), 123-135.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Munir. (2018). Manajemen Pendidikan Berbasis Pesantren. Pustaka Pelajar.

Patton, M. Q. (2015). Qualitative Research & Evaluation Methods (4th ed.). Sage Publications.

Shulman, L. S. (1987). Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.

Silverman, D. (2016). Qualitative Research (4th ed.). Sage Publications.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suyanto, S. (2017). Sosiologi Pendidikan. Rajawali Press.

Zuhdi, M. (2018). Pendidikan Islam di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Tantangan. Jurnal Pendidikan Islam, 5(1), 45-67.